



RENJA

RENCANA KERJA

KANTOR CAMAT
PULAU-PULAU BATU BARAT.

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah-Nya maka Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Camat PP. Batu Barat dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan PP. Batu Barat bertujuan sebagai bahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan PP. Batu Barat Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan PP. Batu Barat merupakan dokumen perencanaan untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat PP. Batu Barat dan menjadi kerangka acuan Kantor Camat PP. Batu Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Dokumen ini disusun setelah melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir.

Akhir kata, diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja kecamatan sehingga kinerja pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan khususnya di wilayah kecamatan PP. Batu Barat menjadi lebih optimal.

Camat Pulau-Pulau Batu Barat,

FAJAR ZEBUA, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 19670726 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	53
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD	59
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2.Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3.Program dan Kegiatan	60
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
 BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat PP.Batu Barat
dan Pencapaian Renstra Kantor Camat PP.Batu Barat s/d tahun 2024..... 8

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat PP.Batu Barat 24

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan... 36

Tabel T-C. 33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan
PP.Batu Barat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah otonomi. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan masyarakat dan sumber daya di daerahnya untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Untuk mewujudkan pembangunan yang optimal dan masyarakat yang sejahtera maka Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan system pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan yang baik maka diperlukan perencanaan pembangunan yang matang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten terdiri dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya. OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan selama satu tahun dengan tetap berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah perlu ada tahapan yang dilalui. Dimulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan terakhir penyusunan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan berbagai program dan rencana strategis Kantor Camat PP.Batu Barat Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Kantor Camat PP.Batu Barat Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka satu tahun yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat PP.Batu Barat Tahun 2021-2026. Dalam Renja ini dimuat hasil evaluasi Renja Tahun sebelumnya, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 beserta analisisnya, Evaluasi pelaksanaan Renstra serta Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat PP.Batu Barat Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PP.Batu Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan.
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.
18. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/917/2024 tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
20. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/68/2024 tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai kerangka dalam menentukan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan PP.Batu Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

- a. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen pelaksanaan kinerja Kantor Kecamatan PP.Batu Barat.
- b. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Kabupaten Nias Selatan.
- c. Tersusunnya program, kegiatan dan alokasi pembiayaan pada kantor Kecamatan PP.Batu Barat dalam kurun waktu tahun 2025.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) ini adalah kerangka awal dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat yang nantinya berfungsi sebagai acuan Kantor Kecamatan PP.Batu Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkapelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui kinerja dan capaian Kantor Kecamatan PP.Batu Barat Tahun 2024 perlu dilakukan analisis Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Pada Analisa yang dilakukan kemudian dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan yang timbul dari pelaksanaan Renja Tahun 2024. Dari hasil Analisa juga dapat diketahui factor pendukung maupun factor penghalang dari tercapainya target indicator kinerja. Dengan diketahuinya hal-hal tersebut kemudian dapat disimpulkan program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk ditambahkan, dikurangi maupun dilanjutkan untuk tahun perencanaan selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan PP.Batu Barat sampai dengan tahun lalu dijabarkan dalam table sebagai berikut :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat PP.Batu Barat
dan Pencapaian Renstra Kantor Camat PP.Batu Barat s/d tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan. administrasi kepegawaian. keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
							Nilai Laki OPD	B		B			B		
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	51 Dokumen	6 Dokumen	10 Dok	6 Dok	60%	10 Dok	22 Dok	43%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	4 Lap	6 Lap	30%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	95 Dokumen	15 Dokumen	19 Dok	17 Dok	89%	3 Dok	35 Dok	37%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	15 Org/Bln	15 Org/Bln	14 Org/Bln	5 Org/Bln	36%	15 Org/Bln	15 Org/Bln	60%
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	60%
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	-	-	-	-	4 Lap	4 Lap	20%
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	10 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	10%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	60%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	15 Paket	14 Paket	11 Paket	79%	30 Paket	56 Paket	37%
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	97%	97%	100%	297%	59%
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%	18 Paket	21 Paket	23%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	20 Paket	80 Paket	78 Paket	98%	20 Paket	118 Paket	118%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	4 Paket	28 Paket	140%
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	-	-	-	-	12 Lap	12 Lap	20%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan	130 Laporan	75 Laporan	74 Laporan	99%	130 Lap	334 Lap	51%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	12 Laporan	2 Lap	2 Lap	100%	60 Lap	74 Lap	2%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	2 Lap	2 Lap	100%	12 Lap	26 Lap	43%
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	25 Lap	42%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	2 Lap	2 Lap	100%	12 Lap	26 Lap	43%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Laporan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	60%
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	14 Lap	23%
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dok	3 Dok	30%
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersedianya Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15 Laporan	-	-	-	-	3 Lap	3 Lap	20%
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lemb. Kemasyarakatan	-	-	-	-	4 Lemb. Kemasyarakatan	4 Lemb. Kemasyarakatan	20%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	-	-	-	-	20 Kel	20 Kel	20%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	-	-	-	-	100%	20%	20%
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Laporan	-	-	-	-	2 Lap	2 Lap	20%
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	-	-	-	-	1 Lap	1 Lap	20%
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Laporan	1 Laporan	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	5 Lap	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	-	-	-	-	40 Orang	40 Orang	20%
7	01	05	2	01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lemb. Kemasyarakatan	4 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	100%	4 Lemb. Kemasyarakatan	4 Lemb. Kemasyarakatan	60%
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	-	100%	100%	100%	100%	40%	40%
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya laporan pelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 Laporan	-	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	20 Lap	40%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	0 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100%	1 Dok	11 Dok	220%
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%
7	01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	20%

Dari table di atas dapat diketahui sejauh mana penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan di Kantor Camat PP.Batu Barat dari Tahun 2022 hingga tahun 2024 dan perbandingannya terhadap target Renstra.

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hingga saat ini capaian program telah menunjukkan 60% dari 100% target Renstra dalam 5 tahun. Hal ini dicapai dari angka capaian setiap tahun program sebesar 100% yaitu dengan telah terlaksananya seluruh kegiatan penunjang urusan di kantor Camat PP.Batu Barat dari tahun 2022, 2023 dan 2024 yang sedang berjalan.

Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan mengingat kemampuan anggaran yang tergolong kurang dan harus mengakomodir kegiatan prioritas lainnya. Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2023 adalah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. kegiatan ini akan dimunculkan dalam Renja kantor Camat PP.Batu Barat Tahun 2025 agar dapat memaksimalkan capaian program penunjang urusan Kantor Camat PP.Batu Barat.

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Dalam 3 tahun pelaksanaan periode RPJMD (2022-2024) program ini selalu diakomodir dalam dokumen Renja dan hingga saat ini telah menunjukkan capaian 60%. Terdapat 2 kegiatan dalam program ini yang direncanakan dalam Renstra yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum belum dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 karena keterbatasan anggaran. Kegiatan ini direncanakan akan diakomodir dalam Renja Tahun 2025 agar target kinerja Renstra kantor Camat dapat tercapai.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada tahun 2022 dan 2023 program ini tidak dilaksanakan karena tidak terakomodir dalam renja. Namun demikian untuk tahun 2024 program ini sudah masuk dalam renja kantor camat PP.Batu Barat dan diprediksi akan dapat terlaksana mencapai target.

Pada perencanaan tahun 2025 program ini akan diakomodir di dalam renja agar dapat mengejar ketertinggalan capaian target Renstra. Selain itu program ini juga penting untuk memberdayakan Masyarakat di

desa salah satunya yaitu memastikan keikutsertaan Masyarakat desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini pada tahun 2022 dan 2023 belum dilaksanakan karena kurangnya anggaran. Namun pada tahun 2024 program ini terakomodir dalam renja dan rencana akan dilaksanakan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Masyarakat terlebih dalam perhelatan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini pada tahun 2022 dan 2023 telah dilaksanakan dan menunjukkan capaian yang tergolong baik. Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan diantaranya pelayanan administrasi kepada Masyarakat, fasilitasi penyelesaian permasalahan dst.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya kemampuan SDM kantor Camat PP.Batu Barat dan kurangnya sarana/prasarana yang memadai sehingga pelayanan kepada Masyarakat kurang optimal. Pada penyusunan renja tahun 2025 hal ini akan menjadi perhatian dan akan direncanakan untuk pelatihan pegawai dan pemenuhan sarana/prasarana kantor camat.

f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Sayangnya pada tahun 2022 program ini tidak terakomodir dalam DPA karena keterbatasan anggaran. Namun demikian pada tahun 2023 dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik. Sub kegiatan dalam program ini adalah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2024 kegiatan ini juga terakomodir dan sedang dalam proses pelaksanaan. Pada tahun 2025 program ini akan tetap diakomodir dalam renja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan PP.Batu Barat disusun dengan memperhatikan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan PP.Batu Barat tahun-tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan sebelumnya perlu dianalisa untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Camat PP.Batu Barat hingga tahun 2024 dijabarkan dalam table berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat PP.Batu Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai LAKIP Kecamatan		√	C	CC	B	B			B	B	Nilai LAKIP Kecamatan merupakan indikator kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Nilai LAKIP Kec.PP.Batu Barat diproyeksikan akan dapat mencapai target dan konsisten setiap tahun. Realisasi Capaian tahun 2023 belum dapat diukur.
2	Persentase ASN yang ikut diklat teknis			13%	13%	13%	13%	18%	0%	13%	13%	Pada target renstra Kantor Camat PP.Barat ditargetkan persentase ASN yang mengikuti diklat teknis terkait tupoksinya adalah sebanyak 13% setiap tahunnya. 2023 terealisasi sebesar 18%. dan Pada tahun 2024 program ini ditampung di dalam Renja untuk dapat memenuhi target indikator kinerja pelayanan PP.Batu Barat
3	Persentase SOP yang diterapkan kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terdapat beberapa SOP di kantor Camat PP.Batu Barat yang telah disusun dan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal. SOP ini akan terus diterapkan dan direvisi jika ada perkembangan setiap tahunnya.
4	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		√	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Indikator ini mendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada tahun 2023 indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2024 ketercapaian indikator ini belum dapat diukur namun diproyeksi akan mencapai target.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Persentase APBDes yang difasilitasi kecamatan		√	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Indikator ini mendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada tahun 2023 indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2024 ketercapaian indikator ini belum dapat diukur namun diproyeksi akan mencapai target.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjabarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor Camat PP.Batu Barat maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas dan fungsi Kantor Camat PP.Batu Barat sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

1. Camat;
2. sekretariat terdiri dari:
 - a) subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. seksi Tata Pemerintahan;
4. seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. seksi Pelayanan Umum;
7. seksi Kesejahteraan Sosial;
8. kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan dan Fungsi

1. Camat

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat PP.Batu Barat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dengan Kedudukan,Tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan, Camat PP.Batu Barat mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau keluraha;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. menyelenggarakan urusan umum;
- d. menyelenggarakan urusan program;
- e. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- b. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukan, dan penyusunan laporan keuangan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- f. menghimpun dan menyusun RENSTRA, menyusun LKPJ, LPPD dan LAKIP kecamatan;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- h. mengavaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. menyusun rencana bahan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- g. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada camat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- A. Mendorong partisipasi masyarakat untu ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam focus musyawarah perencanaan desa/keluarahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial diwilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial sesuai dengan perundang-undangan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada camat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Kasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sosial. Kasi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b) mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c) memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- d) menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- e) mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan diantaranya:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. Untuk mencapai arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, beberapa program dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan Daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dasar. Peran Kecamatan sebagai basis pelaksanaan program sangat besar untuk menunjang keberhasilan output yang diharapkan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

2. Identifikasi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Kantor Camat PP.Batu Barat sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan menjalankan pemerintahan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian Kantor Kecamatan PP.Batu Barat dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor Kecamatan PP.Batu Barat masih banyak yang tidak menguasai tupoksi kerjanya;
- b. Kantor Kecamatan PP.Batu Barat sering terlambat menyerahkan dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan maupun keuangan;
- c. Tidak adanya kesinambungan antara pembangunan desa maupun kecamatan;
- d. Sebagian pegawai kantor camat tidak disiplin;
- e. Pelayanan publik lamban karena kurangnya fasilitas yang memadai.
- f. Sering matinya jaringan listrik dan jaringan internet menyebabkan kinerja terganggu;
- g. Wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten menyulitkan koordinasi dengan OPD terkait;

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas maka kinerja kantor Camat PP.Batu Barat tidak maksimal. Kinerja yang tidak maksimal berimbas pada program dan kegiatan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi capaian kantor Camat PP.Batu Barat yang tidak sesuai target sehingga tidak dapat mendukung visi dan misi Kepala Daerah dari unsur kewilayahan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan daerah

Tantangan ;

- a. Tidak adanya system terstruktur yang mengawasi dan mengukur pelayanan public di Kantor Camat PP.Batu Barat
- b. Kualitas SDM kantor Camat PP.Batu Barat masih belum maksimal
- c. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja
- d. Wilayah kecamatan PP.Batu Barat yang terdiri dari beberapa pulau menyulitkan pelayanan ke desa-desa

Peluang :

- a. Adanya instruksi dan dukungan dari Kepala Daerah terkait peningkatan pelayanan public dan peningkatan kinerja
- b. Adanya dukungan dari anggota DPRD Dapil Kecamatan PP.Batu Barat untuk mengawasi
- c. Adanya dukungan dari Kepala Desa yang saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya khususnya masalah administrasi masyarakat.

5. Formulasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dari uraian tugas, fungsi dan permasalahan di atas kemudian dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di kantor kecamatan PP.Batu Barat yaitu :

- a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan PP.Batu Barat;
- b. Kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan PP.Batu Barat;
- c. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan desa karena rendahnya infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan;
- d. Lemahnya koordinasi antar seksi di kantor Kecamatan PP.Batu Barat;
- e. Tidak lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana kantor Kecamatan PP.Batu Barat;
- f. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan OPD terkait di kabupaten.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari review ini kemudian dapat diketahui perbedaan yang terdapat sehingga dapat ditentukan apakah perlu ada penambahan/pengurangan program/kegiatan.

Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan dalam table berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01					KECAMATAN										
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan pelayanan. administrasi kepegawaian. keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	1.126.454.454	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan pelayanan. administrasi kepegawaian. keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	329.505.000	
								Nilai Lakip OPD	B				Nilai Lakip OPD	B		
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dok	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	16.000.000	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.000.000	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2.000.000	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2.000.000	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	2.500.000	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7.500.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	3.500.000	
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dok	396.306.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	3 Dok	48.000.000	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Org/Bln	381.306.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/ bulan	43.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2.500.000	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	2.500.000	
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	5.000.000	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	2.500.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	2.500.000	
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 Org	36.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	22.500.000	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	15.000.000	
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Org	21.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Org	7.500.000	
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	493.279.623	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	174.387.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	117.602.071	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	24.709.000	
7	01	01	2	06	04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	78.106.852	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	24.812.000	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	31.070.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	6.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	2.500.000	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Lap	260.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Lap	92.366.000	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	135.868.830	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	63.618.000	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Lap	12.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Lap	4.500.000	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	17.908.230	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	6.750.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	41.860.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	8.871.000	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	63.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	43.497.000	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	96.553.239	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	21.995.000	
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	89.053.239	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	21.995.000	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Lap	81.553.239	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.495.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dok	7.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	4.500.000	
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Lap	7.500.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dok	7.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	96.553.239	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	6.500.000	
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	3 Lap	50.130.081	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Lap	6.500.000	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lem. Kemasya katan	35.130.081	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lem. Kemasya katan	6.500.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	7.500.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	7.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	1 Lap	46.423.158	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	-	-	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	20 Kel	46.423.158	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	-	-	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	96.553.239	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	5.000.000	
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Lap	67.330.294	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Lap	5.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	25.030.014	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	42.300.280	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2.500.000	
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Lap	29.222.945	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Lap	29.222.945	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	96.553.239	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	4.500.000	
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Lap	96.553.239	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Lap	4.500.000	
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	40 Org	31.481.239	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	-	-	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	05	2	01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lem. Masyarakat	65.072.000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lemb. Kemasyarakatan	4.500.000	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. PP. Batu Barat	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	96.553.238	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. PP. Batu Barat	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	7.500.000	
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan pelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Lap	96.553.238	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan pelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Lap	7.500.000	
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dok	7.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	7.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	2.500.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	7.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	5.000.000	
7	01	06	2	01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Lap	7.500.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dok	7.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	25.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dok	7.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	7.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Lap	9.508.320	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Lap	9.044.918	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	
JUMLAH										1.609.220.647					375.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat juga dimuat usulan program dan kegiatan dari pamangku kepentingan maupun masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dalam hal ini adalah usulan program dan kegiatan yang muncul dalam Musrenbang tingkat Kecamatan, Reses Anggota DPRD dan usulan OPD (Kantor Camat). Ketiga jenis usulan ini dipilih sebagai sumber usulan program karena sah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan mengandung unsur-unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan PP.Batu Barat dan Reses Anggota DPRD, didapati bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan urusan Kantor Camat PP.Batu Barat atau dapat dikatakan juga bahwa tidak ada usulan yang ditujukan kepada Kantor Camat PP.Batu Barat. Namun demikian terdapat beberapa usulan OPD (kantor Camat PP.Batu Barat) yang dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

No.			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	4	3	5	6
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan pelayanan. administrasi kepegawaian. keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	Usulan OPD
					Nilai Lakip OPD	B	Usulan OPD
1.	1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	Usulan OPD
1.	1.	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Usulan OPD
1.	1.	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Usulan OPD
1.	1.	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Usulan OPD
1.	1.	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Usulan OPD
1.	1.	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Usulan OPD
1.	1.	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	Usulan OPD
1.	1.	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	Usulan OPD
1.	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	3 Dok	Usulan OPD
1.	2.	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/ bulan	Usulan OPD
1.	2.	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	Usulan OPD

No.			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	4	3	5	6
1.	2.	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	Usulan OPD
1.	3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	Usulan OPD
1.	3.	1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	Usulan OPD
1.	3.	2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	Usulan OPD
1.	4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	Usulan OPD
1.	4.	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Usulan OPD
1.	4.	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Org	Usulan OPD
1.	5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Usulan OPD
1.	5.	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	Usulan OPD
1.	5.	2.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Usulan OPD
1.	5.	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Usulan OPD
1.	5.	4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	Usulan OPD
1.	5.	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Lap	Usulan OPD
1.	6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	Usulan OPD
1.	6.	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Lap	Usulan OPD
1.	6.	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Usulan OPD

No.			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	4	3	5	6
1.	6.	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	Usulan OPD
1.	6.	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Usulan OPD
2.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Usulan OPD
2.	1.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	Usulan OPD
2.	1.	1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Usulan OPD
2.	1.	2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	Usulan OPD
3.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Usulan OPD
3.	1.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Lap	Usulan OPD
3.	1.	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lem. Kemasya rakatan	Usulan OPD
4.			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Usulan OPD
4.	1.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Lap	Usulan OPD
4.	1.	1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Usulan OPD
4.	1.	2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Usulan OPD
5.			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. PP. Batu Barat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Usulan OPD
5.	1.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Lap	Usulan OPD

No.			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1			2	4	3	5	6
5.	1.	1.	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lemb. Kemasya rakatan	Usulan OPD
6.			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. PP. Batu Barat	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	Usulan OPD
6.	1.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Tersedianya laporan pelaksanaan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Lap	Usulan OPD
6.	1.	1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	Usulan OPD
6.	1.	2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. PP. Batu Barat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	Usulan OPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk melakukan telaah terhadap kebijakan nasional tahun 2025 terlebih dahulu perlu diketahui Prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dari Prioritas Nasional yang dijabarkan diatas dapat ditentukan beberapa prioritas yang berhubungan dengan tupoksi kantor camat PP.Batu Barat yaitu:

1. Upaya peningkatan pelayanan publik
2. Penyederhanaan Birokrasi
3. Peningkatan kompetensi pegawai
4. Optimalisasi anggaran
5. Mewujudkan keamanan dan ketenteraman di Tengah Masyarakat

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah :

- 1) Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
- 2) Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kinerja pemerintah desa;
- 4) Meningkatnya rasa aman dan nyaman.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Kantor Camat PP.Batu Barat pada tahun 2025, sebagai berikut

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4. Fasilitas kunjungan tamu
- 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2.2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 2.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - 3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 3.3.1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 5.1.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional
- 5.1.2. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 6.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 6.1.4. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- 6.1.5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 6.1.6. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 6.1.7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 6.1.8. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 6.1.9. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- 6.1.10. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisa beberapa data pada bab sebelumnya maka dapat disusun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan PP.Batu Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT KAB. NIAS SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT						375.000.000,00							1.431.040.066,70	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						375.000.000,00							1.431.040.066,70	
	7.01	KECAMATAN						375.000.000,00							1.431.040.066,70	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 Persen			100 Persen	329.505.000,00						100 Persen	1.133.954.453,64	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	-			8 Dokumen	16.000.000,00			-	-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			3 Dokumen	48.000.000,00			-	-	-	-	396.306.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5 Orang/bulan	43.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		381.306.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	-			2 Dokumen	5.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			15 Orang	22.500.000,00			-	-	-	-	36.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	174.387.000,00			-	-	-	-	493.279.623,17	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	24.709.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.602.070,78	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	24.812.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.106.852,12	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.070.700,27	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	92.366.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-			100 Persen	63.618.000,00			-	-	-	-	135.868.830,47	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.750.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.908.230,47	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.871.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.860.600,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.497.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.600.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen			100 Persen	21.995.000,00						100 Persen	89.053.238,88	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			2 Laporan	21.995.000,00			-	-	-	-	89.053.238,88	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	17.495.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.553.238,88	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	6.500.000,00						100 Persen	35.130.080,53	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-			1 Laporan	6.500.000,00			-	-	-	-	35.130.080,53	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga K emasyarakat an	6.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.130.080,53	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen			100 Persen	5.000.000,00						100 Persen	67.330.293,65	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			2 Laporan	5.000.000,00			-	-	-	-	67.330.293,65	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.030.013,51	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.300.280,14	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen			100 Persen	4.500.000,00						100 Persen	65.072.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Laporan	4.500.000,00			-	-	-	-	65.072.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila</i>				4 Lembaga Masyarakat	4.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.072.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</i>	100 Persen			100 Persen	7.500.000,00						100 Persen	40.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Tersedianya laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			2 Laporan	7.500.000,00			-	-	-	-	40.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				9 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				9 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN PULAU-PULAU BATU BARAT
	J U M L A H							375.000.000,00							1.431.040.066,70	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dengan menganalisa data yang ada dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, dokumen Renja Kantor Kecamatan PP.Batu Barat diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kecamatan PP.Batu Barat.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PP.Batu Barat Tahun Anggaran 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nias Selatan khususnya di tahun 2025.

Pulau-Pulau Batu Barat, 29 Juli 2024
Camat Pulau-Pulau Batu Barat,

FAJAR ZEBUA, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 19670726 200212 1 001